

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Irma Lutfiani¹, Herlin², Abdul Rahman³

¹²³Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

irmalutfianni@gmail.com.¹ herlin.olin81@gmail.com^{2*}

abdurahman.abd0505@gmail.com³

Received: 30-12- 2023

Revised: 30-01-2024

Approved: 01-04-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang responden.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan. Hasil uji F secara bersama-sama pengelolaan keuangan, kualitas SDM, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas diterapkan agar dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang kemudian dikelola oleh daerah dapat benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun atasan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa melainkan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas realisasi dari anggaran yang telah dibuat (Pahlawan dkk, 2020).

Tanpa adanya akuntabilitas dana desa dapat mendorong pihak- pihak yang dipercaya untuk mengelola dana justru melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Tidak adanya kesadaran akan pentingnya terhadap pertanggungjawaban atas

tindakan yang dilakukan memicu munculnya tindakan korupsi dan penyalagunaan kekuasaan. Penyalagunaan dana desa dapat berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah desa sebagai pengelola dana (Yusmaniarti & Ummul Khair, 2021)(Arfiansyah, 2020).

program pembangunan desa agar terealisasi maka pemerintah mendistribusikan anggaran khusus yang disebut dana desa. Dana desa yang didistribusikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana desa dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan yang berlaku, dana desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Budiana dkk, 2019).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa memiliki nilai yang cukup tinggi.

Penelitian ini dilakukan didesa tanjung seluai kecamatan seluma selatan karena masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Dan dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan yang terjadi pada pembuatan pelaporan keuangan seperti perekayasa bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Dengan demikian terjadi karna ketidakpahaman aparat tentang arti otonomi dan pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisai dari pemerintahan daerah. Oleh karna fenomena tersebutlah maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada didesa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU 28/1999), sebagai salah satu sumber hukum praktik good governance di Indonesia, menetapkan bahwa Asas Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan negara. Menurut Penjelasan UU 28/1999 tersebut, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu di tetapkan (Rakhmat 2021). Menurut chandler dan piano (1982) mengartikan akuntabilitas sebagai *refers to the institution of checks and balances in an administrative system*. Akuntabilitas menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* (2000), di artikan sebagai *required or expected to give an explanation for one's action*. Oleh sebab itu, akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang di lakukan oleh birokrasi.

Dalam birokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban

aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang di tetapkan (Rakhmat 2021). Pandangan serupa juga di kemukakan oleh tjokroamidjojo dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang di percaya untuk menglola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagi hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Schiavo-Campo and Tomasi (dalam Megandaan 2017) mendefinisikan akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sulistiyani juga menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adisasmita (dalam hamid 2020), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Menurut Sedarmayanti (dalam hamid 2020) akuntabilitas dalam arti sempit adalah bentuk pertanggungjawaban karyawan kepada organisasi, dan mengapa mereka harus bertanggungjawab. Sedangkan akuntabilitas dalam arti luas adalah kewajiban karyawan untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak organisasi/atasan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karenanya, makna akuntabilitas merupakan konsep filosofis inti proses manajemen.

Yuesti (2023) Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, keuangan adalah seluk beluk uang, urusan uang ata keadaan uang.

Dasar dalam pengelolaan keuangan Negara di Indonesia adalah undang-undang

republik indobesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan Negara yang diatur dalam undang-undang keuanagan Negara saat ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, pendelegasin kekuasaan presiden kepada menteri keuangan, dan menteri atau pimpinan lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentua mengenai penyusunan daan penetapan APBD dan APBN, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintahan daerah dan pemerintah atau lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan Negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan APBN. Dalam uandang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi dilingkunagan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi dilingkungan pemerintahan secara internasional.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Juklak Bimkom, 2015).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam organisasi. Sumber daya manusia memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dalam organisasi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah diterima dengan kemampuan yang dimiliki didukung dengan latarbelakang pendidikan dan pengalaman yang memadai (BPKP 2015).

Pahlawan dkk (2020) Kompetensi dapat dilihat dari ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Kompetensi melekat pada manusia dan akan selalu ada dalam kepribadian seseorang yang dapat memprediksi tingkah laku dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam membentuk sumber daya manusia yang andal dimulai sejak tahap seleksi sampai pada pelaksanaan tugas. Sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan. Sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi dapat memberikan keputusan yang baik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) (dalam yuesti (2023)) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat adalah suatu rangkaian proses yang merujuk kepada keikutsertaan seseorang terhadap suatu aktivitas pembangunan (BPKP 2015)

Menurut Soetrisno (dalam hutagalung 2022) Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi di dalam masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam hutagalung (2022) beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi: yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.
- b. Pendekatan partisipasi aktif: yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan: masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

Megandaan (2017) berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, yang merupakan wujud nyata dari prinsip partisipasi masyarakat, menjadi faktor yang penting karena:

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
- b. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya).
- c. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Hipotesis

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa hipotesis adalah: "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga ada pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Selui
- H2 : Diduga ada pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Tanjung Selui
- H3 : Diduga ada pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Tanjung Selui
- H4 : Diduga secara bersama-sama ada pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Selui

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sample yang ditunjuk kepada orang yang signifikan dengan kriteria tertentu yang dapat menyediakan informasi tertentu yang dibutuhkan (Sugiyono, 2012). *Purposive sampling* dalam penelitian ini adalah sampel yang terbatas hanya kepala desa, sekertaris, bendehara dan BPD yang menjabat sebagai aparatur pemerintah desa di desa tanjung selulai kecamatan seluma selatan serta beberapa masyarakat yang termasuk kedalamnya dengan jumlah 50 orang responden.

METODE ANALISIS

Semua pengolahan data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan software pengolahan data yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) Versi 25. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan instrumen penelitian yakni:

Uji Validitas

Uji validitas adalah hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti Sugiyono, (2013).

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisisioner, Sujarweni (2016).

Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2018) Regresi linear berganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen atau regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Rumus regresi linear berganda, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Uji Determinasi (Uji r)

Menurut Sugiyono (2018) “Analisis koefisien determinasi adalah uji dimana untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial”. Sugiyono (2012) analisis koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%.$$

Uji t-test

Menurut Sugiyono (2018) “Uji t atau uji parsial adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen”. Dasar pengambilan keputusan Ghozali, (2015) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu

apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji F-test

Menurut Sugiyono (2018) "Uji t digunakan untuk menguji apakah kedua variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen". Dasar pengambilan keputusannya Ghazali, (2015:48) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dapat disimpulkan hubungan antara indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang valid. Karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ artinya semua item pertanyaan valid.

Uji Realibilitas

Untuk mengetahui reliabilitas suatu alat ukur, instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Tabel 1. Hasil uji realibilitas

No	variabel	Alpha Hitung	Standar Alpha	keterangan
1	Pengelolaan keuangan (X1)	0,794	0,05	<i>Reliabel</i>
2	Kualitas sumber daya manusia (X2)	0,788	0,05	<i>Reliabel</i>
3	Partisipasi masyarakat (X3)	0,654	0,05	<i>Reliabel</i>
4	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	0,666	0,05	<i>Reliabel</i>

Sumber: hasil penelitian, dan data diolah, 2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil Pengujian reliabilitas terhadap semua item pertanyaan secara keseluruhan dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,05$, maka semua instrumen dinyatakan handal.

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linear untuk lebih dari dua variabel disebut analisis regresi linear berganda Subagyo dan Djarwanto (2009).

Tabel 2. Hasil uji regresi berganda

No	variabel	Koefisien Regresi	Standart Error
1	konstanta	10,838	3,997
2	Pengelolaan keuangan (X1)	0,054	0,101
3	Kualitas sumber daya manusia (X2)	0,328	0,107
4	Partisipasi masyarakat (X3)	0,047	0,151

Sumber: hasil penelitian, dan data diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan regresinya.

$$Y = 10,838 + 0,054 (X1) + 0,328 (X2) + 0,047 (X3) + 3,997$$

- Nilai konstanta regresi sebesar 10,838 artinya apabila variabel pengelolaan keuangan (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), partisipasi masyarakat (X3) dengan nol maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mengalami konstan sebesar 10,838.
- Koefisien regresi variabel sebesar 0,054 artinya jika variabel pengelolaan keuangan (X1) berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,054 dikantor desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan.
- Koefisien regresi variabel sebesar 0,328 artinya jika variabel kualitas sumber daya manusia (X2) berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,328 dikantor desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan.
- Koefisien regresi variabel sebesar 0,047 artinya jika variabel partisipasi masyarakat (X3) berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,047 dikantor desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan dengan asumsi menganggap variabel lain adalah tetap.

Uji Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil uji determinasi

R	R Square
0,520	0,271

Sumber: hasil penelitian, dan data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,271 atau 27,1% presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y).

Tabel 4. Hasil uji t

No	Variabel	Taraf Sig.	Sig.Hitung
1	Pengelolaan keuangan (X1)	0,05	0,592
2	Kualitas sumber daya manusia (X2)	0,05	0,004
3	Partisipasi masyarakat (X3)	0,05	0,755

Sumber: hasil penelitian, dan data diolah, 2023

1. Hasil uji Pengelolaan Keuangan (X1) menunjukkan nilai sigfinikasi $0,592 > 0,05$, maka hasil dari hipotesa H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti pengelolaan keuangan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.
2. Hasil uji kualitas sumber daya manusia (X2) menunjukkan nilai sigfinikasi $0,004 < 0,05$, maka hasil dari hipotesa H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.
3. Hasil uji partisipasi masyarakat (X3) menunjukkan nilai sigfinikasi $0,755 > 0,05$, maka hasil dari hipotesa H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti fasilitas (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

Uji Simulatan (Uji f)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1), (X2), dan (X3) secara bersama-sama, apakah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 5. Hasil uji f

No	Taraf Sig.	Sig.Hitung
1	0,05	0,002

Sumber: hasil penelitian, dan data diolah, 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas nilai F dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh simultan antara pengelolaan keuangan (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan

Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan tingkat nilai signifikan $0,592 > 5\%$ untuk variabel pengelolaan keuangan, ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan tidak pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

Dari persepsi responden bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pengelolaan keuangan di desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan sudah mengikuti peraturan yang berlaku.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan uji t_{hitung} untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X2) adalah sebesar 3,054 nilai t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,679. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,054 > 1,679$) dengan signifikan $0,004 < 5\%$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima, berarti kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

Dari persepsi responden bahwa pelatihan dan bimbingan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat membantu untuk penguasaan dan menjalankan tugas serta tanggungjawab yang diberikan sehingga perangkat desa dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian dengan tepat waktu dan efisien.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan

Pengaruh partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) berdasarkan uji t_{hitung} untuk variabel partisipasi masyarakat (X3) adalah sebesar 0,314 nilai t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,679. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,314 < 1,679$) dengan signifikan $0,775 > 5\%$ maka H_0 di terima dan H_a ditolak, berarti partisipasi masyarakat (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

Dari persepsi responden dengan variabel partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh secara signifikan, dikarenakan masyarakat desa tanjung seluai percaya atas kinerja aparatur desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat pada tabel yang diperoleh besarnya F_{hitung} adalah 5,695 sedangkan nilai F_{tabel} digunakan taraf signifikan 5% dengan $df = n - k - 1 = 50 - 3 - 1 = 46$, sehingga diperoleh hasil F_{tabel} sebesar 2,81. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,695 > 2,81$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya berpengaruh secara signifikan dari variabel pengelolaan keuangan (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), partisipasi masyarakat (X3) secara bersama-sama atau simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kantor desa di desa tanjung seluai kecamatan seluma selatan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta regresi sebesar 10,838 artinya jika tidak ada variabel pengelolaan keuangan (X1) sebesar 0

- (tidak ada), nilai variabel kualitas sumber daya manusia (X2) sebesar 0 (tidak ada), nilai variabel partisipasi masyarakat (X3) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) mengalami peningkatan sebesar 10,838.
2. Dari hasil uji t variabel pengelolaan keuangan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa (Y) pada kantor desa di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan, Sedangkan kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan. Selanjutnya partisipasi masyarakat (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada kantor desa di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan.
 3. Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai fhitung lebih besar daripada nilai ftabel yaitu $5.695 > 2,81$, maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh simultan antara pengaruh pengelolaan keuangan (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y). Hal ini terlihat pada tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, Mufti Arief. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 3, No. 1.
- Babulu, Natalia Lily. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 5, No 2.
- Budiana, Dian Astri. Darewis. Nursini. (2019). *The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management*. Scientific Reseach Journal. Vol VII, Issue I.
- BPKP. (2015). *Petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*. BPKP. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro. Yogyakarta.
- Hamid. Hendrawati. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Garis Katulistiwa. Makasar.
- Herwanti, Rr Titiek. (2020). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah*. E- Jurnal Akuntansi. Vol 30, No 7.
- Hutagalung. Simon Sumajoyo. (2022). *Partisipasi dan Pembardayaan Disektor Publik*. Cv Lestari Nusantara Abadi. Malang.
- Mangindaan. Joanne V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good governance*. Unsrat press. Manado.
- Pahlawan, Enggar Wahyuning. Anita. Suhendro. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Indonesia Accounting Jurnal. Vol 2, No 2.
- Raaharjo. Muhamad Mu'iz. (2021). *Pemerintahan desa*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Rakhmat. (2018). *Administarasi dan Akuntabilitas public*. Cv andi offset. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Yusmaniarti, L. N. S., & Ummul Khair, M. (2021). *Perwujudan Good Governance Melalui*

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Journal – Bussiness Management and Accounting*, 2(2), 123-158. <https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>